

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Proses formulasi kebijakan penentuan penerima BLT Dana Desa di Desa Sidomulyo dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi masalah sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dilanjutkan dengan penyusunan alternatif kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini kemudian berlanjut pada tahap verifikasi dan validasi data melalui koordinasi dengan RT, RW, dan kepala dusun untuk memastikan data calon penerima akurat dan sesuai kondisi riil lapangan.

penetapan calon keluarga penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Forum ini menjadi ruang partisipatif yang penting untuk membahas dan menetapkan daftar penerima dan besar nominal yang diterima berdasarkan Hasil Keputusan kepala desa. yang pertama, menyepakati penetapan KPM, Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 300.000 dan disalurkan selama 12 bulan, dengan penerima 33 kepala keluarga (KK)

faktor pendukung dalam formulasi kebijakan ini adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan perangkat desa di tingkat bawah, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah, serta komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan program secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah desa juga telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan sebagai dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan program.

hambatan utama yang dihadapi dalam formulasi kebijakan adalah ketidaksesuaian data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Data DTKS seringkali mengalami keterlambatan pemutakhiran sehingga terdapat nama-nama yang sudah meninggal atau ekonominya sudah membaik namun masih tercatat sebagai keluarga miskin. Sebaliknya, terdapat pula keluarga miskin baru yang belum terdata dalam sistem. Kondisi ini memerlukan upaya verifikasi lapangan yang lebih intensif untuk memastikan ketepatan sasaran program

5.2 SARAN

1. pemerintah desa perlu melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala minimal setiap enam bulan sekali untuk memastikan data yang digunakan mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Pemutakhiran ini dapat dilakukan melalui koordinasi rutin dengan RT dan RW yang lebih memahami kondisi riil warganya. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan sistem informasi desa untuk membangun basis data mandiri yang lebih akurat dan mudah diperbaharui.
2. perlu adanya penguatan kapasitas perangkat desa dan relawan pendataan melalui pelatihan teknis mengenai metode pendataan kemiskinan yang lebih komprehensif. Pelatihan ini dapat mencakup teknik wawancara, observasi lapangan, serta penggunaan aplikasi atau sistem informasi untuk mempermudah proses pendataan dan verifikasi. Dengan kapasitas yang

lebih baik, proses identifikasi calon penerima akan lebih objektif dan terhindar dari bias subjektif.

3. perlu adanya sinkronisasi data yang lebih baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait untuk memastikan data DTKS yang digunakan selalu terkini. Pemerintah desa dapat mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat desa yang lebih mengetahui kondisi lapangan. Sinkronisasi data ini penting untuk menghindari duplikasi penerima dan memastikan bantuan tepat sasaran.
4. pemerintah desa perlu memperkuat sosialisasi dan transparansi publik tidak hanya pada tahap penetapan penerima tetapi juga pada seluruh tahapan formulasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan pengumuman di setiap dusun, grup komunikasi warga, atau pertemuan rutin tingkat RT dan RW. Transparansi yang komprehensif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik sosial akibat kesalahpahaman.
5. untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan penerima dan perekonomian desa secara keseluruhan. Penelitian evaluatif semacam ini penting untuk mengukur efektivitas program dan memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Penelitian juga dapat difokuskan pada aspek keberlanjutan program dan strategi graduation untuk membantu penerima keluar dari kemiskinan.

6. pemerintah desa dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program pendamping BLT Dana Desa berupa pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan ekonomi produktif. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif jangka pendek tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima dalam jangka panjang. Program pendamping ini dapat berupa pelatihan usaha mikro, bantuan modal usaha kecil, atau program pemagangan yang disesuaikan dengan potensi lokal desa.